

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan Kol Wahid Udin Lingk. I Kabupaten Musi Banyuasin
 0714 - 321138  : bpkad@mubakab.go.id Kode Pos : (30711)



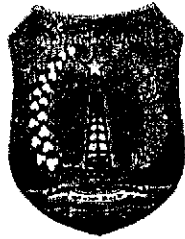
Bpkad Kab Muba



bpkad.mubakab.go.id



@bpkad_kabmuba



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk.I Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon: 0714-321138 Faksimile : 0714- 322508 Kode Pos : (30711)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 114 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 15 (Ayat I), bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

- b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021, tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

13. Keputusan Bupati nomor 0050/I88/TAPD/SE/XII/2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

14. Surat Edaran Nomor : B-000.7.3/032/BAPPEDA/2025, tanggal 14 Februari 2025 tentang Rencana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Satgas Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menghimpun semua data baik yang bersifat Administrasi Umum maupun Operasional yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Tahun Anggaran 2025.

b. Melakukan koordinasi, konsultasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- c. Melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Melakukan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- e. Melakukan Perbaikan/Revisi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan perkembangan kinerja, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- f. Melaporkan perkembangan Penyusunan/Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 17 Februari 2025

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. ZABIDI, SE.,MM

Pembina Utama Muda

NIP 19650409 198503 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Nomor : 114 /KPTS/BPKAD/2025

Tanggal : 12 Februari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Satgas Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
2.	KETUA	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
3.	SEKRETARIS	Perencana Ahli Muda. Sub Koordinator (Sub.Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) BPKAD Kab. Muba	
4.	KOORDINATOR	1. Kabid Anggaran. 2. Kabid Akuntansi. 3. Kabid Pengelolaan Aset Daerah. 4. Kabid Perbendaharaan.	
5.	ANGGOTA	1. Kasubbid. Anggaran III 2. Kasubbid. Perbendaharaan I 3. Kasubbid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 4. Kasubbid. Pengelolaan Aset I 5. Anwar, S.E., M.Si 6. Dodi Irawan, S.E 7. Tanti Rohyati, A.Md 8. Yosi Pratama, A.Md 9. Solihan	

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, 4

H. ZABIDI, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650409 198503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan. Kol. Wahid Udin Lingk.I Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon: 0714-321138 Faksimile : 0714- 322508 Kode Pos : (30711)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 214/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG
REVISI PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 15 (Ayat I), bahwa :
1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
 2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

- b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan revisi pembentukan tim satgas penyusun Rencana kerja (Renja) tahun 2026 dan rencana kerja (Renja) perubahan tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ tanggal 25 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 Nomor7);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021, Perubahan atas Nomor 98 Tahun 2019 dan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;;
17. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 120//KPTS/BPKAD/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk tim satgas penyusun rencana kerja (Renja) tahun 2026 dan rencana kerja (Renja) perubahan tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun semua data baik yang bersifat Administrasi Umum maupun Operasional yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Tahun 2025.

- b. Melakukan koordinasi, konsultasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dan Perubahan Tahun 2025.
- c. Melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dan Perubahan Tahun 2025.
- d. Melakukan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dan Perubahan Tahun 2025.
- e. Melakukan Perbaikan/Revisi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan tahun 2025 sesuai dengan perkembangan kinerja, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- f. Melaporkan perkembangan Penyusunan/Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Tahun 2025 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



ARIYANTO, SE., M.Si

Pembina/IV.a

NIP 19780427 200212 1 007

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

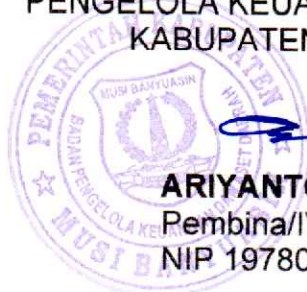
Nomor : 214 /KPTS/BPKAD/2025

Tanggal : 10 Juni 2025

Tentang : Revisi Pembentukan Tim Satgas Penyusun Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
2.	KETUA	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	
3.	SEKRETARIS	Perencana Ahli Muda. Sub Koordinator (Sub.Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) BPKAD Kab. Muba	
4.	KOORDINATOR	1. Kabid Anggaran. 2. Kabid Akuntansi. 3. Kabid Pengelolaan Aset Daerah. 4. Kabid Perbendaharaan.	
5.	ANGGOTA	1. Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi Anggaran 2. Kasubbid. Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah 3. Kasubbid. Pelaporan Perbendaharaan 4. Kasubbid. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 5. Kasubbid. Pendayagunaan dan Pengendalian Aset 6. Anwar, S.E., M.Si 7. Dodi Irawan, S.E 8. Helya Silvi Wahyuni,A.Md.Kb.N 9. Tanti Rohyati, A.Md 10. Yosi Pratama, A.Md 11. Uswatun Hasanah., S.E 12. Bambang Agus Irawan., S.E	

Plt. KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



ARIYANTO,SE., M.Si

Pembina/IV.a

NIP 19780427 200212 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu
Telp. 0714-321138 Fax. 0714-322508 Sekayu (30711)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 253/KPTS/BPKAD/2025**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 15 (Ayat I), bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ tanggal 25 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 Nomor7);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021, Perubahan atas Nomor 98 Tahun 2019 dan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;;
17. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 120//KPTS/BPKAD/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang memuat program, kegiatan, Sub Kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja.

- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Induk dan Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengevaluasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Induk dan Perubahan Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 26 Juni 2025

Plt. KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



ARIYANTO., SE., M.Si
Pembina

NIP 19780427 200212 1 007

KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) 2023-2026, Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk mengemban tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023 – 2026 yang dituangkan dalam rencana kerja selama satu tahun. Untuk tercapainya tujuan tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan pada Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana kerja, penegakan disiplin dan budaya kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimtek/diklat, pemantapan administrasi keuangan daerah, mewujudkan administrasi keuangan daerah sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah untuk meningkatkan kinerja Badan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Di dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2025 ini ditetapkan rencana

capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dengan didukung oleh 3 program dan 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan untuk mencapai Tujuan ke 3 (Ketiga) Kabupaten Musi Banyuasin **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”** untuk mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Tujuan yaitu **Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah.** untuk mencapainya dalam Tahun 2025 ini. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya semoga Rencana Kinerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya **good governance** di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 26 Juni 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ARIYANTO, S.E., M.Si

Pembina

NIP 19780427 200212 1 007



Daftar Isi

	<u>halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	4
I.3. Maksud dan Tujuan	7
I.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	10
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD.....	10
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..	56
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	58
II.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat....	79
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD.....	89
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	89
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	98
III.3 Program dan Kegiatan.....	102
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	128
BAB V PENUTUP	150

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran BAB II.1 (TC.29)	Halaman.....	20
2. Lampiran BAB II.2 (TC.30)	Halaman.....	31
3. Lampiran BAB II.4 (TC.31)	Halaman.....	59
4. Lampiran BAB II.5 (TC.32)	Halaman.....	80
5. Lampiran BAB III.3 (TC.33)	Halaman.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan PD merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh PD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) PD untuk tahun rencana yang dimaksud. Rencana kerja PD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Rencana Kerja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja PD Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal PD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan PD, adalah sebagai berikut :

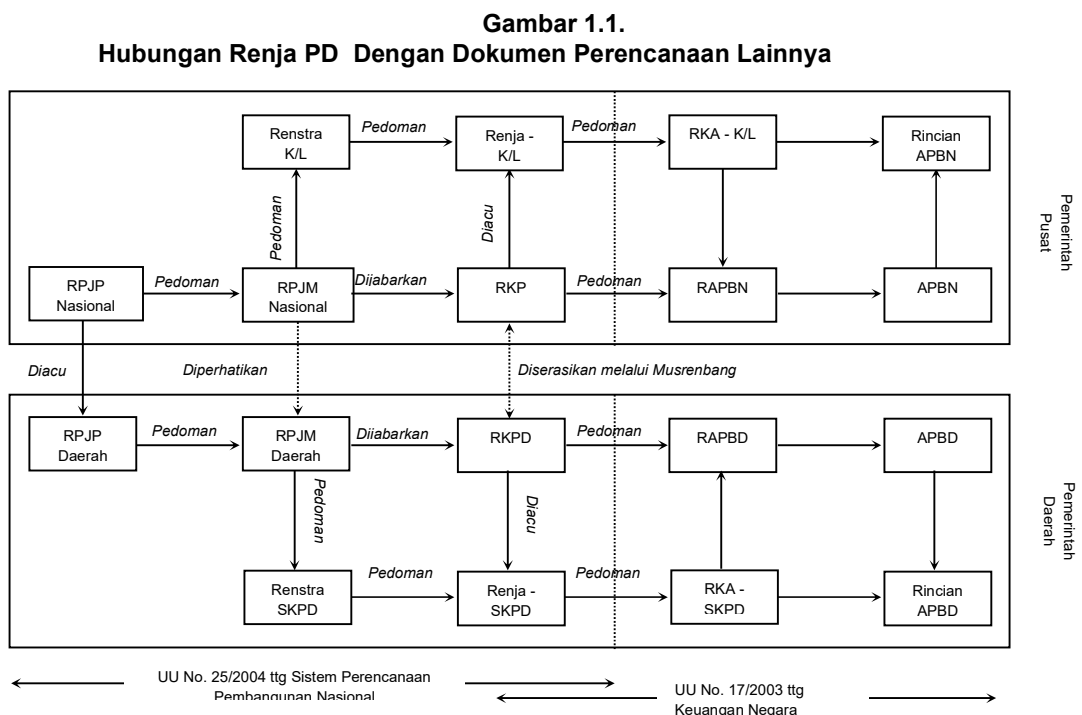
1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja perubahan PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan dan penunjang pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
3. Penyusunan Renja Perubahan PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD-P, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD-P;
4. Rumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan di dalam renja Perubahan PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan/ penunjang pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD-P dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perubahan PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD-P. Renja PD.

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati nomor : B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Rencana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat (Renja-PD) Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Penyesuaian Arah

Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dengan memastikan Visi-Misi dan Program unggulan Kepala Daerah Terpilih serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan.

Gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1



Dalam kaitan dengan **sistem keuangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD satu tahun ke depan. Dengan demikian Perangkat Daerah dapat menentukan besaran anggaran

yang diperlukan dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan secara bertahap akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-PD.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021, tentang Perubahan Nomor 98 Tahun 2019 Penganti Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

I.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden No.29/2014 tentang SAKIP;
15. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
18. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pengganti Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 270 Tahun 2021, Perubahan atas Nomor 98 Tahun 2019 dan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

24. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-3036 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16)
25. Surat Edaran Bupati nomor : B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tentang Rencana Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat (Renja-PD) Sebagai Tindak Lanjut Terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Perioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

I .3 Maksud dan Tujuan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah. Guna mendukung Tujuan ke-3 (Tiga) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”***

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur BPKAD sehingga tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan tahunan yang Transparan, Akurat, akuntabel dan Terdepan (TAAT);

2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur pengelolaan keuangan dalam perumusan substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, terinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten guna tercapainya efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 serta Visi-Misi dan Program unggulan Kepala Daerah Terpilih serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi, Evaluasi capaian kinerja dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang ;
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tugas dan fungsi.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang berisi I.1. Latar Belakang, I.2. Landasan Hukum, I.3. Maksud dan Tujuan dan I.4. Sistematika Penulisan.

Bab	II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisikan II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD, II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri III.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional, III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD, III.3. Program dan Kegiatan.
Bab	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab	V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Realisasi Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp. **30.279.632.315.00** atau (5,79%) dari Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 522.899.586.811,00 yang terdiri dari :

1. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
2. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa
3. Realisasi Bunga
4. Belanja Tidak Terduga
5. Belanja Bantuan Keuangan

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 pengganti Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

- 1) Data Realisasi anggaran Belanja Pegawai yang terpakai pada BPKAD Kab. Muba Per tanggal 31 Maret 2025. Realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 12.240.570.311,00 atau (16,15%) dari Anggaran sebesar Rp. 1.977.170.867,00. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket
A.	Belanja Pegawai	12.240.570.311,00	1.977.170.867,00	16,15%
Total Belanja Pegawai		12.240.570.311,00	1.977.170.867,00	16,15%

- 2) Realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terpakai (1 Januari s/d 31 Maret 2025) pada BPKAD Kab. Muba adalah sebesar Rp. 9.165.696.782,00,00 atau 9,63% dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 882.919.138,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket
B	Belanja Barang dan Jasa	9.165.696.782,00	882.919.138,00	
	1 Belanja Barang	2.038.932.822,00	73.030.629,00	
	2 Belanja Jasa	3.550.817.210,08	422.727.762,00	
	4 Belanja Pemeliharaan	895.684.749,92	60.258.561,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	2.680.262.000,00	326.902.186,00	
	1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.680.262.000,00	326.902.186,00	
Sub Total Belanja Barang dan Jasa		9.165.696.782,00	882.919.138,00	9,63%

- 3). Realisasi anggaran Belanja Modal yang terpakai (1 Januari s/d 31 Maret 2025) pada BPKAD Kab. Muba adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 289.836.798,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket
D	Belanja Modal	289.836.798,00	0,00	0,00%
	1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	107.496.618,00	0,00	
	2 Belanja Modal Komputer	178.487.370,00	0,00	
	3 Belanja Modal Aset Lainnya	3.852.810,00	0,00	

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Per program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tercantum pada Tabel dibawah ini sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI S/D TRIWULAN I	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	558.171.851.176,00	27.720.426.280,00	4,96
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.171.453.529,00	82.135.251,00	3,78
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.278.105.474,00	2.477.070.784,00	15,22
Jumlah Total Anggaran			522.899.586.811,00	30.279.632.315.00	5,79

Implementasi Rencana Strategis 2023-2026 pada tahun Anggaran 2025 mencakup pelaksanaan 54 Sub kegiatan 14 Kegiatan dan 3 program untuk mendukung 4 sasaran strategik. Capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2025 dan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2023–2026, telah ditetapkan 3 program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 pengganti Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perlu dilakukan. **Program** merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan **Kegiatan** merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin dan **Sub Kegiatan** merupakan penjabaran dari kegiatan sebagai arah untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran kegiatan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan sub kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 pengganti dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin, maka program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Program utama yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1). *Program Pengelolaan Keuangan Daerah*

Kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.

Kegiatan :

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan Analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.

Kegiatan :

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah.
2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 7. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 8. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah;
 9. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota;
 10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

Kegiatan :

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah

Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah;
2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

2). Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. Pengamanan Barang Milik Daerah;
5. Penilaian Barang Milik Daerah;
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
10. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

**3). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Kegiatan :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan/Material;
7. Fasilitas Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel.

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dari hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Penjelasan diatas dapat dilihat pada table dibawah ini :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
BPKAD KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tabel T-C.29

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket er a ng an
										Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5					URUSAN	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan										
5	02				BIDANG URUSAN	Keuangan										
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
						2	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
						3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
						4	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 laporan	3,00	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	9 laporan	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket er a ng an
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bayar	79 Orang	79 Orang	79 Orang	79 Orang	79	79 orang	234 orang	3,04	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ Bulan	76 Orang	79 Orang	79 Orang	79	79 Orang	234 Orang	3,00	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang di Asuransikan	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	39 Unit	3,00	
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Unit	3,00	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PIM	12 Orang	43 Orang	12 Orang	2 Orang	17	10 Orang	55 Orang	3,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Jenis	3,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Jenis	1,50	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Jenis	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Keterangan
										Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	6 Jenis	3,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	5 Jenis	2,99	
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket	0	1 Paket	1 Paket	1,00	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	3,00	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	3,00	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	86 Unit	39 Unit	34 Unit	87	34 Unit	154 Unit	3,08	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanKabel/Internet	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	3,00	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	3,00	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Keterangan
										Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	3,00	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100	11 unit	33 unit	3,00	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Paket	3,00	
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 unit	65 Unit	65 Unit	65 Unit	100	71 Unit	201 Unit	3,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30.03%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
							Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	46.18%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
							Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	91.63%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
							Persentase Penurunan SILPA	33%								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket er a ng an
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
							Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%								
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Output	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Output	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Output	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	8 Dokumen	3,00	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Output	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	3,00	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pengelolaan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	21 Jenis	3,00	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Orang	3,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket er a ng an
					Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Ting k at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	15 Dokumen	3,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen							
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	3,00	
5 02 02 2.03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Output	Tersusunnya laporan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	24 Laporan	0 Laporan	24 Laporan	0	24 Laporan	24 Laporan	1,00	
5 02 02 2.03 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Output	Tersedianya laporan rekonsiliasi Keuangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	1,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket er a ng an
								Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Ting k at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5 02 02 2.03 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.				Output	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100	14 Laporan	42 Laporan	3,00
5 02 02 2.03 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				Output	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	3,00
5 02 02 2.03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Output	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokume n	3,00
5 02 02 2.03 0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokume n	1,00
5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				Output	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokume n	3,00
5 02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				Output	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokuumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokume n	1,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket er a ng an
										Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah/Kota	Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	0 Orang	96 Orang	0 Orang	0	144 Orang	144 Orang	1,00	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Output	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	33 Lembaga	0 Lembaga	33 Lembaga	0 Lembaga	0	33 Lembaga	33 Lembag a	1,00	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Output	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	1,00	
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Output	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	1 Laporan	5 Laporan	4,00	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Output	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	3,00	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Output	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Aplikasi	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket er a ng an
										Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	0 Orang	96 Orang	96 Orang	100	144 Orang	240 Orang	2,00	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Data aset yang akurat	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	3,00	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 laporan	3,00	
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Output	Tersedianya peraturan bupati untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	6 Dokume n	2,00	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Output	JJumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	3,00	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Output	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Tanah	3,00	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Output	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	2 Laporan	4 Sertifikat tanah	3,01	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Output	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	3,00	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	3,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan		Ket er a ng an
										Target Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024 (n-2)	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)	
1					2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Output	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokume n	3,00	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Output	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	5 Laporan	3,21	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Output	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	3,00	
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	0 Orang	66 Orang	66 Orang	100	190 Orang	256 Orang	3,00	

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

Sesuai dengan Rencana Srategis (Renstra) BPKAD 2023-2026, telah ditetapkan 2 sasaran strategik dengan 4 (empat) indikator kinerja dan pencapaian kinerja pelayanan untuk Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi Tahun 2025 (thn n)	Catatan Analisis
			Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (TW I)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)		100%	100%	100%	100%	100%	38%	100%	
2	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	
3	Persentase Pencairan Dana On Skedul		100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	
4	Persentase Data Aset yang Akurat		100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025, implementasi Rencana Strategis 2023-2026 mencakup pelaksanaan 54 Sub Kegiatan, 14 kegiatan dan 3 program untuk mendukung 4 sasaran strategik Capaian kinerja (*Performance Results*). selama Tahun 2025 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi s/d TW I
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1.	Persentase SKPD yang penganggarnya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	(%)	100%	38%
		2.	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	(%)	100%	25%
		3.	Persentase Pencairan Dana On Skedul	(%)	100%	25%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel	1.	Persentase Data Aset Yang Akurat	(%)	100%	88%
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan	1.	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.	(%)	100%	25%
		1.	Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	(%)	100%	25%
		2.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	(%)	100%	25%
		3.	Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	(%)	100%	50%

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, dengan 4 (empat) indikator yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan I Tahun 2025.

Untuk mencapai sasaran **meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah** ada 3 indikator kinerja sasaran didukung oleh **program Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menunjang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Persentase	25%	38%	152%
	2. Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Persentase	25%	25%	100%
	3. Pencairan Dana On Schedule	Persentase	25%	25%	100%

1. Indikator kinerja Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian			
	Triwulan I Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Persentase	25 %	38 %	152 %

Berdasarkan tabel di atas Indikator kinerja Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 dari target 25% dan realisasi 38% sehingga memperoleh capaian 152%. Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktifitas. Efisiensi yaitu sejauh mana perbandingan tingkat keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang digunakan. Anggaran tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada rencana tertentu yang pelaksanaannya disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Tolak ukur keberhasilan anggaran terletak pada prestasi hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membuat suatu sistem penganggaran dan memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan RKA-SKPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 48 SKPD telah memenuhi prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja walaupun pada triwulan I tahun 2025 masih terdapat beberapa SKPD yang melakukan kesalahan dalam penganggaran atau kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja, hal ini terlihat dengan masih adanya usulan revisi/pergeseran anggaran kegiatan dari SKPD. Untuk capaian persentase SKPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I sesuai dengan capaian target yaitu 100%

Adapun prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang diterapkan SKPD dalam hal penganggaran sebagai dasar pengukuran penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) SKPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

➤ **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**

Anggaran OPD pada suatu kegiatan telah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Hal ini tergambar pada indikator dan tolok ukur kinerja telah sesuai dengan belanja yang dianggarkan pada RKA-OPD.

➤ **Disiplin anggaran :**

Belanja yang dianggarkan pada setiap rekening belanja OPD merupakan batasan tertinggi atau sudah sesuai dengan Standar Biaya dan output yang ditetapkan. Adapun apabila masih terdapat anggaran yang tidak sesuai atau masih terdapat kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja dilakukan pergeseran anggaran dalam tahun berjalan. Dalam hal ini tergambar pada tabel realisasi IKU per triwulan yaitu persentase OPD yang penganggarnya menerapkan ABK mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV yaitu 100%.

➤ **Keadilan anggaran :**

Dalam hal pengalokasian anggaran OPD, penggunaan anggarannya dialokasikan dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Dalam penetapan dan pembagian pagu anggaran tentunya memperhatikan anggaran untuk pelayanan

dasar seperti anggaran kesehatan, pendidikan dan perumahan.

➤ Efektifitas dan efisiensi anggaran :

Penyusunan anggaran OPD dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan stakeholders.

➤ Disusun dengan pendekatan kinerja :

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggaran berbasis kinerja pada OPD di Kabupaten Musi Banyuasin telah diterapkan pada awal tahun anggaran berjalan (N) karena pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau (N-1) sebelum diterbitkan DPA dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD, bahwa TAPD harus menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, TAPD melalui Bidang Anggaran telah mengeluarkan **Surat Edaran** tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2025, sebagai acuan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang mencakup :

1. Prioritas Pembangunan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait.
2. Alokasi Plafond Anggaran Sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan.

3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
4. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, Kode Rekening APBD, Format RKA-SKPD Analisis Standar Belanja (ASB), RKBMD dan Kebijakan Penyusunan APBD.

Capaian indikator penganggaran berbasis kinerja didukung oleh :

- Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Untuk capaian persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I sesuai dengan capaian target yaitu 100%.

2. Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP

dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian			
	Triwulan I Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Persentase	25%	25%	100

Berdasarkan table diatas Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dari target 25% dengan realisasi 25%. Merupakan indikator kinerja target dgn realisasi sesuai dengan formula yang telah di dibuat dalam IKU.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan entitas pelaporan, dan oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. 22 dinas daerah;
- f. 6 badan daerah; dan

g. 15 kecamatan.

Laporan Keuangan OPD yang disusun Tahun 2025 terdiri dari:

a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Tahun

Anggaran 2024 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan
- b. Laporan Realisasi APBD Bulanan Tahun Anggaran 2025.

Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dari target pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 25% dengan capaiannya 25% untuk Laporan Laporan Realisasi APBD Bulanan TA. 2025. Dari total 47 OPD semuanya sudah menyajikan Laporan Realisasi Keuangan OPD sesuai SAP. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2025 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi.

Capaian indikator Laporan Keuangan OPD sesuai SAP didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut:

Program : Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah

- Sub Kegiatan : 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3. Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
7. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
8. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
9. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten/Kota

10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD

Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
Daerah

Sub Kegiatan : 1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah
2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Indikator Kinerja Persentase Pencairan Dana On Schedule

dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian			
	Triwulan I Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pencairan Dana On Schedule	Persentase	25%	25%	100%

Dari uraian tabel diatas bahwa Capaian indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule pada Triwulan I tahun 2025 mencapai 25% dari target 25%. Pencairan Dana On Schedule yang dimaksud artinya pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari 48 OPD sebanyak 1776 Surat Perintah Membayar (SPM) dibagi dengan total SP2D yang diterbitkan sebanyak 1776 SP2D di kali 100 % maka didapat hasil 100% realisasi dan 100% capaian.

Selanjutnya untuk mendukung capaian realisasi Indikator Pencairan Dana On Schedule di dukung oleh :

- Program : Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang daerah sebagai Optimalisasi kas.

Untuk mencapai sasaran ***Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah*** ada 1 indikator kinerja sasaran didukung oleh program **Pengelolaan Barang Milik Daerah** yang menunjang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dibawah ini:

1. Indikator Kinerja Persentase Data Aset Yang Akurat

dengan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian			
	Triwulan I Tahun 2025			
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Data Aset Yang Akurat	Persentase	25%	88%	352 %

Berdasarkan Tabel di atas Capaian Indikator Kinerja dilaksanakan dan disusun berdasarkan data aset yang akurat menyajikan setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang akuntabel berdasarkan kepada persentase data aset yang akurat merupakan nilai perolehan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul hingga aset tersebut siap digunakan atau dioperasikan.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Data Aset Yang Akurat Tahun 2025 mencapai 100 % dengan capaian 100%. Persentase data aset yang akurat diukur berdasarkan dari Nilai Aset yang tercatat secara akurat terhadap Laporan Barang Milik Daerah dari 48 OPD telah disajikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 melalui proses verifikasi dan rekonsiliasi oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.

Laporan Nilai Aset secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 14.297.261.607.832,90,- terdiri dari Tanah (KIB A) sebesar Rp. 624.505.131.992,18,- Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp. 1.319.722.109.606,82,- Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp.

3.109.001.272.268,15,- Jalan, Irigansi dan Jaringan (KIB D) sebesar Rp.
9.029.012.334.747,13,- Aset tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp.
84.206.790.489,25,- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp.
130.813.968.729,42.

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Bidang Pengelolaan Aset
Daerah BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin didukung oleh :

- Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. Pengamanan Barang Milik Daerah;
5. Penilaian Barang Milik Daerah;
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
10. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

2 Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir.

a) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja		Satuan	Proyeksi Capaian 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2023 (%)	% Rata-rata capaian	Ket
1	Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Persentase	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Persentase	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pencairan Dana On Schedule	Persentase	100%	100%	100%	100%	

b) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel

Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja		Satuan	Proyeksi Capaian 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2023 (%)	% Rata- rata capaian	Ket
1	Persentase Data Aset Yang Akurat	Persentase	100%	100%	100%	100%	

c) Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan

Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2025 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Indikator Kinerja		Satuan	Proyeksi Capaian 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2023 (%)	% Rata- rata capaian	Ket
1	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.	Persentase	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	Persentase	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Persentase	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Laporan capaian Kinerja	Persentase	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja		Satuan	Proyeksi Capaian 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2023 (%)	% Rata-rata capaian	Ket
	dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel						

3. Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan Tahun ini dan beberapa tahun.

Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan capaian Realisasi kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

a) Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Naik (Turun)	Ket
			2023	2024	Proyeksi 2025		
1	Persentase SKPD yang penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Persentase	100%	100%	100%	Tetap	
2	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Persentase	100%	100%	100%	Tetap	
3	Persentase Pencairan Dana On Schedule	Persentase	100%	100%	100%	Tetap	

b) Sasaran Indikator Sasaran kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Naik (Turun)	Ket
			2023	2024	Proyeksi 2025		
1	Persentase Data Aset Yang Akurat	Persentase	100%	100%	100%	Tetap	

4. Perbandingan capaian Realisasi kinerja Proyeksi Tahun 2025 dengan target dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2023-2026.

Pada capaian ini dapat di lihat perbandingan capaian realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi Realisasi s/d 2025	Target 2025	Capaian %
1	Persentase SKPD yang penganggara nnya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Pencairan Dana On Schedule	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1. Capaian Indikator Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data realisasi persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada tahun pertama Renstra 2023-2026, proyeksi pada tahun 2025 dengan tingkat pencapaian yaitu 100%. pada tahun 2025 target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik dan secara umum semua OPD telah melaksanakan penganggaran berbasis kinerja. Program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan.

2. Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Data Persentase laporan keuangan OPD sesuai SAP pada tahun pertama Renstra 2023-2026 proyeksi pada tahun 2025 dengan tingkat pencapaian yaitu 100%. untuk melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu hambatan ini terbukti dengan telah selesainya 48 OPD menyelesaikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP.

3. Capaian Indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Data Persentase Pencairan Dana On Schedule pada tahun pertama Renstra 2023-2026 proyeksi pada tahun 2025 dengan tingkat pencapaian yaitu 100%, Capaian indikator untuk melaksanakan Pencairan Dana On Schedule dan target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu hambatan ini terbukti dengan telah selesainya 48 OPD menyelesaikan semua proses Pembayaran sesuai dengan Schedule yang tepat waktu.

b. Sasaran Indikator Sasaran kualitas pengelolaan aset daerah yang akuntabel

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi Realisasi s/d 2025	Target 2025	Capaian %
1	Persentase Data Aset Yang Akurat	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Data capaian indikator Persentase Data Aset pada tahun pertama Renstra 2023-2026 proyeksi pada tahun 2025 dengan tingkat pencapaian yaitu 100% Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu merevisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi terkait Aset sebagai Pedoman Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah mengikuti dinamika perkembangan regulasi mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tindaklanjut rekomendasi BPK-RI terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Untuk mewujudkan tujuan **Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan** telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran **Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan**, dengan 4 (empat) indikator yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian			
		Triwulan I Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.	Persentase	25%	25%	100%

Capaian indikator Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sebesar 25% dari target 25%. Hal ini didukung oleh :

Program : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Kinerja		Capaian			
		Triwulan I Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
2	Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	Persentase	25%	25%	100%

Capaian indikator Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran sebesar 25% dari target 25%. Hal ini didukung oleh :

Program : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan/material
7. Fasilitas Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator Kinerja		Capaian			
		Triwulan I Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Persentase	25%	12,55%	50%

Capaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik sebesar 12,55% dari target 25%. Hal ini didukung oleh :

Program : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel

kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja		Capaian			
		Triwulan I Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
4	Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	Persentase	25%	25%	100%

Capaian indikator Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel sebesar 25% dari target 25%. Hal ini didukung oleh :

Program : Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan

Indikator Kinerja		Satuan	Proyeksi Capaian 2025	Capaian 2024	Capaian 2023	% Rata-rata capaian	Ket
1	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.	(%)	100	100	100	100%	
2	Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	(%)	100	100	100	100	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	(%)	100	100	100	100	
4	Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	(%)	100	100	100	100	

Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan Tahun ini dan beberapa tahun

Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan

Keuangan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Naik (Turun)	Ket
		2023	2024	Proyeksi 2025		
1. Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu.	(%)	100%	100%	100%	Tetap	
2. Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	(%)	100%	100%	100%	Tetap	
3. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	(%)	100%	100%	100%	Tetap	
4. Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	(%)	100%	100%	100%	Tetap	

Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun Tahun 2023 dengan target dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2023-2026

Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan

Keuangan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi Realisasi s/d 2025	Target 2025	Capaian %
1. Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	(%)	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi Realisasi s/d 2025	Target 2025	Capaian %
2.	Persentase Pemenuhan layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	(%)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	(%)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	(%)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel diatas dapat kita lihat Capaian dari keempat Indikator pada Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan, pada awal tahun Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 BPKAD, pada tahun pertama Renstra Tahun 2023 keempat indicator tercapai 100% dari target 100%, dan diharapkan sampai dengan tahun Renstra 2026 tidak mengalami penurunan capaian target.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam Perencanaan Pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang, suatu kondisi/kejadian yang

menjadi isu Strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan Peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, karekteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersipat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian, dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, untuk memperoleh rumusan isu-isu Strategis di perlukan analisis terhadap berbagai faktor dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin, mengacu kepada Isu-isu Strategis untuk mendukung Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sangat penting dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari segi laporan Keuangan yang mencerminkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, Akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governence).

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi di mana terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa isu-isu strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Musi Banyuasin, selama beberapa tahun sebelumnya dan berbagai permasalahan dan potensi Pengembangan, Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin di masa depan, serta menelaah dokumen-

dokumen perencanaan antara lain Renstra kementerian/lembaga, Renstra Provinsi, RT/RW Kabupaten Musi Banyuasin dan KHLS sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran masih menghadapi kendala akibat kurangnya pemahaman teknis dalam proses perencanaan;
2. Jumlah dan kompetensi aparatur yang menangani keuangan masih perlu ditingkatkan.
3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transparansi dan efisiensi anggaran.
4. Data Aset masih kurang informatif, sementara pemanfaatan dan pengamanan aset belum berjalan optimal.

Dengan mengangkat ke 5 (lima) Isu Strategis di atas, di harapkan agar terbentuk Program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029, serta dapat menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih dan Akuntabel sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel T.C 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NAMA OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tabel T.C31

No	Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting
	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah				583.297.367.608,24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah				583.297.367.608,24	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				583.297.367.608,24	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				583.297.367.608,24	
	5 0 2	KEUANGAN				583.297.367.608,24	KEUANGAN				583.297.367.608,24	

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting		
	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	5	0 2 0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A		1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 2. Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran 3. Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 4. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	100% 100% 100% 100%	18.198.744.995,44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 2. Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran 3. Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 4. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	100% 100% 100% 100%	18.198.744.995,44	
	5	0 2 0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	100 %	51.667.127,72	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	100 %	51.667.127,72	

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.667.332,72	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.667.332,72	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.999.795,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.999.795,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN Perangkat Daerah yang Gaji dan tunjangannya terpenuhi	79 Orang/bu lan	14.586.021.212,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN Perangkat Daerah yang Gaji dan tunjangannya terpenuhi	79 Orang/bul an	14.586.021.212,00	
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bul an	14.586.021.212,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bul an	14.586.021.212,00	PENDAPATA N BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah kendaraan Roda Empat Perangkat Daerah yang terlindungi	13 Unit	122.582.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah kendaraan Roda Empat Perangkat Daerah yang terlindungi	13 Unit	122.582.000,00	
	5	0	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	122.582.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	122.582.000,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengembangan, pelatihan, pengelolaan data dan kebutuhan kelengkapan pegawai Perangkat Daerah	100 %	144.840.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengembangan, pelatihan, pengelolaan data dan kebutuhan kelengkapan pegawai Perangkat Daerah	100 %	144.840.000,00	
	5	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	144.840.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	144.840.000,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum dan kelengkapan kantor Perangkat Daerah	100 %	1.190.226.784,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum dan kelengkapan kantor Perangkat Daerah	100 %	1.190.226.784,00	

N o	Rancangan Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.417,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.417,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	316.093.432,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	316.093.432,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.995.070,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.995.070,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	330.005.636,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	330.005.636,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	88.355.029,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	88.355.029,00	PAJAK DAERAH

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.340.200,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.340.200,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.437.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.437.000,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	59.988.829,80	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	59.988.829,80	
	5	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	59.988.829,80	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	59.988.829,80	PAJAK DAERAH

N O	Rancangan Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi pada Perangkat Daerah	100 %	1.057.790.432,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi pada Perangkat Daerah	100 %	1.057.790.432,00	
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	445.132.032,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	445.132.032,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	612.658.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	612.658.400,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	100 %	985.628.609,92	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	100 %	985.628.609,92	

N O	Rancangan Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.490.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.490.000,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	439.540.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	439.540.000,00	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	424.433.049,92	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	424.433.049,92	PAJAK DAERAH
	5	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	76.165.560,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	76.165.560,00	PAJAK DAERAH

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	5	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Pencairan Dana On Schedul Persentase SKPD yang Penganggaranny a Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100% 100% 100%	564.017.889.112,80	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Pencairan Dana On Schedul Persentase SKPD yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100% 100% 100%	564.017.889.112,80	
	5	0 2	0 2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen	583.460.000,25	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen	583.460.000,25	
	5	0 2	0 2	2.0 1	000 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.680.000,25	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.680.000,25	DANA BAGI HASIL (DBH)

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	25.955.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	25.955.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	205.745.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	205.745.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	148.840.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	148.840.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	137.240.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	137.240.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0 2	0 2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pengelolaan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.420.199.950,00	Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pengelolaan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.420.199.950,00	
	5	0 2	0 2	2.0 2	000 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	66.702.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	66.702.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0 2	0 2	2.0 2	000 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	54.293.500,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	54.293.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0 2	0 2	2.0 2	000 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	49.204.450,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	49.204.450,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

N O	Rancangan Perubahan RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting	
	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	5.250.000.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	5.250.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	554.622.650,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	554.622.650,00	
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	34.186.500,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	34.186.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	5	0 2	0 2	2.0 3	000 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	29.802.400,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	29.802.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0 2	0 2	2.0 3	000 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	84.151.400,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	84.151.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0 2	0 2	2.0 3	000 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	69.666.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	69.666.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	89.382.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	89.382.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	41.790.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	41.790.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

N o	Rancangan Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	43.279.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	43.279.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	001	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	39.910.900,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	39.910.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	58.179.500,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	58.179.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	001	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	33 Lembaga	64.274.450,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	33 Lembaga	64.274.450,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

N O	Rancangan Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	557.239.185.862,55	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	557.239.185.862,55	
	5	0	0	2.0	000	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	541.746.901.358,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	541.746.901.358,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA DESA
	5	0	0	2.0	000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	15.442.284.504,55	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	15.442.284.504,55	DANA BAGI HASIL (DBH)

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	5	0 2	0 2	2.0 5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah	100 %	220.420.650,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah	100 %	220.420.650,00	
	5	0 2	0 2	2.0 5	000 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	160.143.000,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	160.143.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0 2	0 2	2.0 5	000 3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	60.277.650,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	60.277.650,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
3	5	0 2	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	7%	1.080.733.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	7%	1.080.733.500,00	

N O	Rancangan Perubahan RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting			
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	1.080.733.500,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	1.080.733.500,00	
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	104.978.400,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	104.978.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	110.080.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	110.080.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	71.126.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	71.126.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	241.478.700,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	241.478.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

N O	Rancangan Perubahan RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting	
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0	000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.287.400,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.287.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	46.630.200,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	46.630.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	001	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	115.921.800,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	115.921.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	001	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	42.498.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	42.498.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

N o	Rancangan Perubahan RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan (2026)					Catatan Penting
	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2.0	001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin , Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	153.647.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	153.647.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
	5	0	0	2.0	001	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	137.086.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	137.086.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
										583.297.367.608,24					583.297.367.608,24	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari perangkat Daerah Kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan Informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamat pelaksanaan Musrembang Kabupaten/kota (bila sudah dilakukan), sampai dengan Rencana Kerja Perubahan ini diusulkan belum ada usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2025, akan tetapi usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan para Pemangku kepentingan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pemangku Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

USULAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TA PERUBAHAN 2025

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

OPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tabel T.C32

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah				583.297.367.608,24	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				583.297.367.608,24	
5	0				KEUANGAN				583.297.367.608,24	
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 2. Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran 3. Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu 4. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	100% 100% 100% 100%	18.198.744.995,44	
5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	5 Dokumen	51.667.127,72	
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.667.332,72	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.999.795,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN Perangkat Daerah yang Gaji dan tunjangannya terpenuhi	114 Orang	14.586.021.212,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	14.586.021.212,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
5	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah kendaraan Roda Empat Perangkat Daerah yang terlindungi	13 Unit	122.582.000,00	
5	0	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	122.582.000,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pengembangan, pelatihan, pengelolaan data dan kebutuhan kelengkapan pegawai Perangkat Daerah	100 %	144.840.000,00	
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	144.840.000,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum dan kelengkapan kantor Perangkat Daerah	100 %	1.190.226.784,00	
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.417,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	316.093.432,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.995.070,00	PAJAK DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	330.005.636,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	88.355.029,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.340.200,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.437.000,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	59.988.829,80	
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	59.988.829,80	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi pada Perangkat Daerah	100 %	1.057.790.432,00	
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	445.132.032,00	PAJAK DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	612.658.400,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	100 %	985.628.609,92	
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.490.000,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	439.540.000,00	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	424.433.049,92	PAJAK DAERAH
5	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	76.165.560,00	PAJAK DAERAH
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Pencairan Dana On Schedul Persentase SKPD yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100% 100% 100%	564.017.889.112,80	
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen	583.460.000,25	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.680.000,25	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	25.955.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	205.745.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	148.840.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	137.240.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pengelolaan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.420.199.950,00	
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	66.702.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	54.293.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	49.204.450,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	5.250.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
2	2	2	2	5						
5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	554.622.650,00	
2	2	2	3							
5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	34.186.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
2	2	2	3	1						
5	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	29.802.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
2	2	2	3	2						
5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	84.151.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
2	2	2	3	3						
5	0	0	2.0	000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	69.666.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
2	2	2	3	4						
5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	89.382.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
2	2	2	3	5						

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	41.790.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	43.279.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	001	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	39.910.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	58.179.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	33 Lembaga	64.274.450,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	557.239.185.862,55	
5	0	0	2.0	000	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	541.746.901.358,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA DESA
5	0	0	2.0	000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	15.442.284.504,55	DANA BAGI HASIL (DBH)

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
5	0	0	2.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100 %	220.420.650,00	
5	0	0	2.0	000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	160.143.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	60.277.650,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	7%	1.080.733.500,00	
5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan	1.080.733.500,00	
5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	104.978.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	110.080.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	71.126.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	241.478.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.287.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
								Target	Jumlah Pagu	
1					2	3	4	5	6	7
5	0	0	2.0	000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	46.630.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	001	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	115.921.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	001	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	42.498.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	153.647.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)
5	0	0	2.0	001	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	137.086.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi RPJMN tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 adalah

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 adalah

“Sumsel maju terus untuk semua”

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan, pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
3. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.
4. Meningkatkan penyeenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas. Meningkatkan

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten, kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

5. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
6. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai Upaya mengatasi perubahan iklim.

Visi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 adalah **“Muba Maju Lebih Cepat Bersama Menyejahterakan Musi Banyuasin”**

Dari Visi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif dan Melayani.
2. Penguatan SDM melalui transformasi bidang Pendidikan dan Kesehatan
3. Rekonstruksi Sosial dan Ekonomi menuju Musi Banyuasin Sejahtera
4. Penguatan Moderasi Beragama dan Ekonomi Keumatan
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Dasar dan Mendorong Konektivitas.
6. Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Perguruan Tinggi
7. Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Dinamika kebijakan pembangunan Nasional antara lain :

1. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);

3. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Dukungan Swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing.
 - 1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
 - 1.2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
2. Menurunkan Angka Kemiskinan
 - 2.1 Menurunkannya ketimpangan pendapatan Masyarakat
 - 2.2 Menurunkannya Tingkat pengangguran terbuka
 - 2.3 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah
 - 3.1 Meningkatnya pendapatan Masyarakat
 - 3.2 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan
 - 3.3 Terjaganya Stabiitas harga bahan pokok
4. Mewujudan Masyarakat Religius, Rukun, dan Harmonis yang didukung Sumber Daya Ekonomi Keummatan.
 - 4.1 Terciptanya kerukunan umat beragama

- 4.2 Meningkatnya partisipasi dan pemanfaatan zakat masyarakat
- 4.3 Meningkatnya Usaha / industri yang menerapkan standar halal
- 5. Mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan Publik yang berkualitas
 - 5.1 Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik
 - 5.2 Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN
 - 5.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 6. Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas
 - 6.1 Meningkatnya kondisi kemantapan jalan kabupaten dan jalan strategis lainnya (SK Jalan kabupaten)
 - 6.2 Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Permukiman
 - 6.3 Meningkatnya rumah tangga yang memiliki hunian layak
- 7. Mewujudkan Musi Banyuasin yang Inovatif dan berdaya saing
 - 7.1 Meningkatnya Inovasi Daerah
 - 7.2 Meningkatnya kewirausahaan dan kemampuan Masyarakat dalam menggunakan teknologi digital
 - 7.3 Meningkatnya Pembangunan Desa
- 8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 - 8.1 Turunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
 - 8.2 Turunnya Potensi Risiko Bencana

Dengan mengacu hal tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi maka penyesuaian Isu strategis RKPD

Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2025 pada perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Penurunan Kemiskinan, Stunting dan Pengangguran;
2. Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat masih rendah;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah;
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian dan digitalisasi Pelayanan Publik;
5. Tata Kelola pemerintahan yang bersih dan upaya penegakan hukum;
6. Pelestarian lingkungan dan penurunan risiko bencana;
7. Tuan Rumah PORPROV Sumsel XV dan PEPARPROV Sumsel V Tahun 2025.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah merancang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pondasi Transformasi melalui Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
2. Menyiapkan Pondasi Transformasi melalui Penyusunan Peta Jalan (Road Map) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Kemiskinan serta Membentuk Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Daerah
3. Menyiapkan Pondasi Kebijakan dan Kelembagaan untuk menciptakan Kerukunan Umat, Ekosistem Usaha Halal dan Pengelolaan Dana Umat
4. Membangun dan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berorientasi kinerja dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;
5. Menyiapkan sinergi/kolaborasi Pemerintah dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan Daya Saing Daerah

6. Menyusun Peta Jalan Pengelolaan SDA berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, Penurunan Risiko Bencana, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Rencana Perluasan Jaringan Gas Rumah Tangga

Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin juga memperhatikan 5 (lima) Arah Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang disebut Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, fokus pada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, fokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi dengan pendekatan Omnibus Law;
4. Penyederhanaan Birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang serta menyederhanakan eselonisasi;;
5. Transformasi Ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Perwujudan Transformasi Ekonomi;
2. Peningkatan kondusivitas perekonomian wilayah;
3. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah;
4. Peningkatan kualitas dan daya saing Angkatan kerja;
5. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan dan Kesehatan;
7. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
8. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah;
9. Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sumatera Selatan.

Memperhatikan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2025 serta rancangan isu strategis, maka Perubahan Rancangan Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 diarahkan pada ***“Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Musi Banyuasin Maju lebih Cepat dan Sejahtera”***.

Untuk mendukung tema Pembangunan tahun 2025 tersebut maka ditetapkan 6 (enam) Prioritas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta penguatan moderasi beragama dan ekonomi keumatan;
2. Rekonstruksi sosial dan ekonomi melalui peningkatan Pendapatan dan mengurangi Beban Masyarakat untuk menurunkan kemiskinan;
3. Meningkatkan percepatan pemerataan infrastruktur dasar untuk konektivitas mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
6. Transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, inovatif dan melayani.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang pemerintah daerah Urusan Keuangan guna mendukung ***Misi 1 (satu)*** Kabupaten Musi Banyuasin yaitu ***“Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Inovatif dan Melayani”*** dengan tujuan sasaran Kabupaten RPJMD 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Prioritas Daerah P-RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
	Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Inovatif dan Melayani	Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Bebas dari KKN dan berorientasi pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan beretika serta bebas dari KKN	Survey Penilaian Integritas	Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Inovatif dan Melayani

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Tujuan dan Sasaran serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi Kabupaten Musi Banyuasin, Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, yang akan mengarahkan rumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaannya.

Tujuan :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aset daerah
2. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Keuangan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dinyatakan pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Berikut ini adalah sasaran yang ingin dicapai BPKAD untuk Tahun 2025 dan indikator sasarannya :

Tabel 3.2.1**Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase SKPD yang Penganggarannya menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	%	100%
	2. Persentase Laporan keuangan OPD sesuai SAP	%	100%
	3. Persentase Pencairan dana on skedul	%	100%
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	1. Persentase Data aset yang akurat	%	100%
3. Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	%	100%
	2. Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	%	100%
	3. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100%
	4. Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	%	100%

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan Penetapan kebijakan yang merupakan legal dari sub kegiatan, kegiatan yang

akan dilaksanakan serta penyusunan program-program strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan **program, kegiatan** dan **sub kegiatan** guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran tujuan pemerintah daerah. Kebijakan dilaksanakan melalui strategi :

1. Peningkatan koordinasi SKPD dan TAPD dalam rangka penyusunan Anggaran yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Diklat;
2. Peningkatan koordinasi dengan PD dalam rangka penyusunan Laporan keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Diklat;
3. koordinasi PD dalam rangka penatausahaan keuangan daerah yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan Diklat;
4. Optimalisasi penggunaan dan pemamfaatan BMD;
5. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan BMD;
6. Melaksanakan inventarisasi BMD secara berkala;
7. Peningkatan Kapasitas SDM yang dimiliki;
8. Peningkatan Manajemen aset melalui Aplikasi yang handal dan terintegrasi;
9. Peningkatan Jaminan Pengamanan BMD;
10. Kerjasama (MoU) dengan Instansi vertikal/lembaga terkait sertifikat tanah dan pengamanan kendaraan dinas;

11. Melakukan pengawasan secara berjenjang dan mengikutsertakan ASN dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan formal;
12. penyediaan sarana dan prasarana aparatur.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran Kabupaten yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dilakukan. Perangkat Daerah, **Program** merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan **kegiatan** merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten. Dan **sub kegiatan** Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 sebagai pengganti Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

III.3 Program dan Kegiatan

Mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penunjang di Bidang Keuangan maka mempunyai beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi 3 program, 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan untuk mendukung 4 (empat) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Program utama yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Dari Program diatas didukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
4. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan Analisis pembiayaan dan Penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan

- Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
7. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 8. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 9. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;
 10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota;

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah.
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;
2. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

2). Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Di dukung oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
4. Pengamanan Barang Milik Daerah;
5. Penilaian Barang Milik Daerah;
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
9. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
10. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah..

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan/Material
7. Fasilitas Kunjungan Tamu;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Musi Banyuasin
Perubahan Tahun 2025**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.45.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.45.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kode						Ura s n / Bidang Ura s n / Progra m / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
						Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah					583.297.367.60 8,24					583.297.367.60 8,24			
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					583.297.367.60 8,24					583.297.367.60 8,24			
5	0 2					KEUANGAN					583.297.367.60 8,24					583.297.367.60 8,24			
5	0 2	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.198.744.995 ,44					18.198.744.995 ,44			
5	0 2	0 1	2.0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					51.667.127,72					51.667.127,72			
5	0 2	0 1	2.0 1	000 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan , penganggara n dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	100 %	41.667.332,72	Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.667.332,72		
5	0 2	0 1	2.0 1	000 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	3 Laporan	100 %	9.999.795,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9.999.795,00
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14.586.021.212,00					14.586.021.212,00
5	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bayar	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	79 Orang/bulan	12 Bulan	14.586.021.212,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	14.586.021.212,00
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							122.582.000,00					122.582.000,00
5	02	01	2.03	0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang di Asuransikan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Dokumen	13 Unit	122.582.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	122.582.000,00
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							144.840.000,00					144.840.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Paket	100 %	-	Pajak Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-
5	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	12 Orang	100 %	144.840.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	144.840.000,00
5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.190.226.784,00					1.190.226.784,00
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi													
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	30.000.417,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.417,00
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
	2	1	6	2														

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	316.093.432,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	316.093.432,00
5	02	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	59.995.070,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.995.070,00
5	02	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Paket	100 %	330.005.636,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	330.005.636,00
5	02	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Paket	100 %	88.355.029,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	88.355.029,00
5	02	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan/Material												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	40.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00
5	02	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	12 Laporan	100 %	25.340.200,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.340.200,00
5	02	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	12 Laporan	100 %	300.437.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.437.000,00
5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								59.988.829,80					59.988.829,80
5	02	01	207	0005	Pengadaan Mebel													
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	30 Unit	100 %	59.988.829,80	Pajak Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	59.988.829,80

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	0	0	2.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Unit	100 %	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.057.790.432,00					1.057.790.432,00	
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	12 Laporan	100 %	445.132.032,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	445.132.032,00	
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	12 Laporan	100 %	612.658.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	612.658.400,00	
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								985.628.609,92					985.628.609,92	
5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

Kode					Ura n / Bidang Ura n / Progra m / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Unit	100 %	45.490.000,00	Pajak Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.490.000,00
5	0 2	0 1	2.0 9	000 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	11 Unit	100 %	439.540.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	439.540.000,00
5	0 2	0 1	2.0 9	000 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Unit	100 %	424.433.049,92	Pajak Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	424.433.049,92
5	0 2	0 1	2.0 9	001 1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	71 Unit	100 %	76.165.560,00	Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	76.165.560,00
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							564.017.889.112,80				564.017.889.112,80	
5	02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							583.460.000,25				583.460.000,25	
5	02	02	2.01	0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS												
						Persentase SKPD Yang Penganggarnya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	65.680.000,25	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.680.000,25
5	02	02	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS												
						Persentase SKPD Yang Penganggarnya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	25.955.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	25.955.000,00
5	02	02	2.01	0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												

Kode						Ura s n / Bidang Ura s n / Progra m / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	
						Persentase SKPD Yang Penganggara nya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	2 Dokum en	205.745.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	205.745.000,00	
5	0 2	0 2	2.0 1	000 8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
						Persentase SKPD Yang Penganggara nya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	2 Dokum en	148.840.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	148.840.000,00	
5	0 2	0 2	2.0 1	000 9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
						Persentase SKPD Yang Penganggara nya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	2 Dokum en	137.240.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	137.240.000,00	
5	0 2	0 2	2.0 2			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								5.420.199.950, 00					5.420.199.950, 00

Kode						Ura s n / Bidang Ura s n / Progra m / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
5	0	0	2.0	000	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
							Persentase Pencairan Dana On Schedul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase pengelolaan Penatausahaan, Perbendaharaan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	7 Dokumen	100 %	66.702.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	66.702.000,00
5	0	0	2.0	000	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													
							Persentase Pencairan Dana On Schedul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase pengelolaan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	100 %	54.293.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	54.293.500,00
5	0	0	2.0	000	5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas													

Kode					Urusa n / Bidang Urusa n / Progra m / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target		
						Persentase Pencairan Dana On Schedul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase pengelolaan Penatausaha n, Perbendahar aan Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	5 Dokumen	100 %	49.204.450,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	49.204.450,00	
5	0 2	0 2	2.0 2	8		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
						Persentase Pencairan Dana On Schedul	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase pengelolaan Penatausaha n, Perbendahar aan Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Dokumen	100 %	5.250.000.000, 00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	5.250.000.000, 00	
5	0 2	0 2	2.0 3			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							554.622.650,00					554.622.650,00	
5	0 2	0 2	2.0 3	000 1		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													

Kode					Ura n / Bidang Urusa n / Progra m / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	24 Laporan	1 Lapora n	34.186.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	34.186.500,00
5	0 2	0 2	2.0 3	000 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	1 Lapora n	29.802.400,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	29.802.400,00
5	0 2	0 2	2.0 3	000 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	14 Laporan	1 Lapora n	84.151.400,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	84.151.400,00
5	0 2	0 2	2.0 3	000 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													

Kode					Ura s n / Bidang Ura s n / Progra m / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasi n, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	1 Lapora n	69.666.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	69.666.000,00
5	0 2	0 2	2.0 3	000 5		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota												
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	1 Lapora n	89.382.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	89.382.500,00
5	0 2	0 2	2.0 3	000 7		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	1 Laporan	41.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	41.790.000,00	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	43.279.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	43.279.000,00	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	39.910.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	39.910.900,00	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

Kode					Ura n / Bidang Ura s a n / Progra m / Kegiat an / Sub Kegiat an	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat a n				Tolok Ukur	Target		
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	144 Orang	1 Lapora n	58.179.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	58.179.500,00	
5	0 2	0 2	2.0 3	001 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota													
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	33 Lembaga	1 Lapora n	64.274.450,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	33 Lembaga	64.274.450,00	
5	0 2	0 2	2.0 4			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							557.239.185.86 2,55					557.239.185.86 2,55	
5	0 2	0 2	2.0 4	000 2		Analisis Investasi Pemerintah Daerah													
						Persentase Pencairan Dana On Schedul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah	Kab. Musi Banyuasi n, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	50.000.000,00	
5	0 2	0 2	2.0 4	000 8		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Pencairan Dana On Schedul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	541.746.901.358,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Perimbangan, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Desa		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	541.746.901.358,00
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
						Persentase Pencairan Dana On Schedul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	15.442.284.504,55	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	15.442.284.504,55
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								220.420.650,00					220.420.650,00
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah													
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Dokumen	100 %	160.143.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	160.143.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
					Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	144 Orang	100 %	60.277.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	60.277.650,00	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								1.080.733.500,00				1.080.733.500,00	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								1.080.733.500,00				1.080.733.500,00	
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah													
					Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	3 Dokumen	1 Laporan	104.978.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	104.978.400,00	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
					Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Laporan	1 Laporan	110.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	110.080.000,00	
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	71.126.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	71.126.000,00
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
						Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	241.478.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	241.478.700,00
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah													
						Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	57.287.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	57.287.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
						Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	46.630.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	46.630.200,00
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
						Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	115.921.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	115.921.800,00
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
						Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Laporan	1 Laporan	42.498.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	42.498.000,00
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
						Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	3 Laporan	1 Laporan	153.647.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	153.647.000,00	
5	02	03	2.01	0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Persentase Data Aset Yang Akurat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	190 Orang	1 Laporan	137.086.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	137.086.000,00	
TOTAL													583.297.367.608,24				523.808.236.191,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap program, Kegiatan dan Sub kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahunnya. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Adapun Program, Kegiatan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN MUSI BANYUASIN

URAIAN						Anggaran pada Tahun 2025
(1)						(2)
TOTAL PENDANAAN RENCANA KERJA TA 2025						583.297.367.608,24
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.198.744.995,44
5.	02.	01.	1.	01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.667.127,72
5.	02.	01.	1.	01.	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.667.332,72
5.	02.	01.	1.	01.	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.795,00
5.	02.	01.	1.	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.586.021.212,00
5.	02.	01.	1.	02.	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.586.021.212,00
5.	02.	01.	1.	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	122.582.000,00
5.	02.	01.	1.	03.	0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	122.582.000,00
5.	02.	01.	1.	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.840.000,00

URAIAN							Anggaran pada Tahun 2025
(1)							(2)
5.	02.	01.	1.	05.	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.840.000,00
5.	02.	01.	1.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.190.226.784,00
5.	02.	01.	1.	06.	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.417,00
5.	02.	01.	1.	06.	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.093.432,00
5.	02.	01.	1.	06.	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.995.070,00
5.	02.	01.	1.	06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.005.636,00
5.	02.	01.	1.	06.	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.355.029,00
5.	02.	01.	1.	06.	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00
5.	02.	01.	1.	06.	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.340.200,00
5.	02.	01.	1.	06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.437.000,00
5.	02.	01.	1.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.988.829,80
5.	02.	01.	1.	07.	0005	Pengadaan Mebel	59.988.829,80
5.	02.	01.	1.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.057.790.432,00
5.	02.	01.	1.	08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.132.032,00
5.	02.	01.	1.	08.	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.658.400,00
5.	02.	01.	1.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.628.609,92
5.	02.	01.	1.	09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.490.000,00
5.	02.	01.	1.	09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	439.540.000,00
5.	02.	01.	1.	09.	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.433.049,92
5.	02.	01.	1.	09.	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.165.560,00
5	02	02.				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	564.017.889.112,80
5	02	02.	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	583.460.000,25
5	02	02.	2	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	65.680.000,25
5	02	02.	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.955.000,00
5	02	02.	2	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	205.745.000,00

URAIAN							Anggaran pada Tahun 2025
(1)							(2)
5	02	02.	2	01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	148.840.000,00
5	02	02.	2	01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	137.240.000,00
5	02	02.	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.420.199.950,00
5	02	02.	2	02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	66.702.000,00
5	02	02.	2	02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	54.293.500,00
5	02	02.	2	02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49.204.450,00
5	02	02.	2	02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.250.000.000,00
5	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	554.622.650,00
5	02	02	2	03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.186.500,00
5	02	02	2	03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	29.802.400,00
5	02	02	2	03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	84.151.400,00
5	02	02	2	03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	69.666.000,00
5	02	02	2	03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	89.382.500,00
5	02	02	2	03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	41.790.000,00
5	02	02	2	03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	43.279.000,00
5	02	02	2	03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	39.910.900,00

URAIAN							Anggaran pada Tahun 2025
(1)							(2)
5	02	02	2	03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	58.179.500,00
5	02	02	2	03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	64.274.450,00
5	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah	557.239.185.862,55
5	02	02	2	04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000,00
5	02	02	2	04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	541.746.901.358,00
5	02	02	2	04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.442.284.504,55
5	02	02	2	05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	220.420.650,00
5	02	02	2	05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	160.143.000,00
5	02	02	2	05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60.277.650,00
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.080.733.500,00
5	02	03	2.	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.733.500,00
5	02	03	2.	01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	104.978.400,00
5	02	03	2.	01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	110.080.000,00
5	02	03	2.	01	0006	Invetarisasi Barang Milik Daerah	71.126.000,00
5	02	03	2.	01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	241.478.700,00
5	02	03	2.	01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	57.287.400,00
5	02	03		01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	46.630.200,00
5	02	03	2.	01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	115.921.800,00
5	02	03	2.	01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan laporan BMD	42.498.000,00
5	02	03	2.	01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	153.647.000,00
5	02	03	2.	01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	137.086.000,00

Dari tabel diatas dapat dilihat Untuk menunjang program Utama BPKAD pada tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Yang terdiri dari 1 Program, 5 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Yang terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan

3. Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan

Yang terdiri dari 1 Program, 8 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Musi Banyuasin
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
					Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			583.297.367.608,24				583.297.367.608,24
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			583.297.367.608,24				583.297.367.608,24
5	0				KEUANGAN			583.297.367.608,24				583.297.367.608,24
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	18.198.744.995,44		-	100%	18.198.744.995,44
	2	1				Persentase pemenuhan layanan Keuangan dan administrasi perkantoran	100%				100%	
						Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%				100%	
						Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan Akuntabel						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		100%	51.667.127,72		-	100%	51.667.127,72
5	0	0	20	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	41.667.332,72	PAJAK DAERAH		2 Dokumen	41.667.332,72
5	0	0	20	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	3 Laporan	9.999.795,00	PAJAK DAERAH		3 Laporan	9.999.795,00
5	0	0	20		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di bayar		79 Orang	14.586.021.212,00		-	79 Orang	14.586.021.212,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	79 Orang/bulan	14.586.021.212,00	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		79 Orang/bulan	14.586.021.212,00
5	0	0	20		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang di Asuransikan		13 Unit	122.582.000,00		-	13 Unit	122.582.000,00
5	0	0	20	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Dokumen	122.582.000,00	PAJAK DAERAH		1 Dokumen	122.582.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	144.840.000,00		-	100%	144.840.000,00
5	0	0	20	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Paket	-	PAJAK DAERAH		1 Paket	-
5	0	0	20	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	12 Orang	144.840.000,00	PAJAK DAERAH		12 Orang	144.840.000,00
5	0	0	20		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	1.190.226.784,00		-	100%	1.190.226.784,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Paket	30.000.417,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	30.000.417,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Paket	316.093.432,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	316.093.432,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Paket	59.995.070,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	59.995.070,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Paket	330.005.636,00	PAJAK DAERAH		2 Paket	330.005.636,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Paket	88.355.029,00	PAJAK DAERAH		2 Paket	88.355.029,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Paket	40.000.000,00	PAJAK DAERAH		1 Paket	40.000.000,00
5	0	0	20	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	12 Laporan	25.340.200,00	PAJAK DAERAH		12 Laporan	25.340.200,00
5	0	0	20	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	12 Laporan	300.437.000,00	PAJAK DAERAH		12 Laporan	300.437.000,00
5	0	0	20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	59.988.829,80		-	100%	59.988.829,80
5	0	0	20	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	30 Unit	59.988.829,80	PAJAK DAERAH		30 Unit	59.988.829,80

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Unit	-	PAJAK DAERAH		1 Unit	-
5	0	0	20		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		100 %	1.057.790.432,00		-	100 %	1.057.790.432,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	12 Laporan	445.132.032,00	PAJAK DAERAH		12 Laporan	445.132.032,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	12 Laporan	612.658.400,00	PAJAK DAERAH		12 Laporan	612.658.400,00
5	0	0	20		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan		100%	985.628.609,92		-	100%	985.628.609,92
5	0	0	20	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Unit	45.490.000,00	PAJAK DAERAH		1 Unit	45.490.000,00
5	0	0	20	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	11 Unit	439.540.000,00	PAJAK DAERAH		11 Unit	439.540.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Serasan Jaya						
5	0	0	20	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	25.955.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	25.955.000,00
5	0	0	20	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	205.745.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	205.745.000,00
5	0	0	20	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	148.840.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	148.840.000,00
5	0	0	20	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	137.240.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	137.240.000,00
5	0	0	20		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan penatausahaan Perbendaharaan Daerah		100%	5.420.199.950,00		-	100%	5.420.199.950,00
5	0	0	20	000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	7 Dokumen	66.702.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		7 Dokumen	66.702.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20	000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	54.293.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	54.293.500,00
5	0	0	20	000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	5 Dokumen	49.204.450,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		5 Dokumen	49.204.450,00
5	0	0	20	000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Dokumen	5.250.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	5.250.000.000,00
5	0	0	20		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin		1 Laporan	554.622.650,00		-	1 Laporan	554.622.650,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20	000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	24 Laporan	34.186.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		24 Laporan	34.186.500,00
5	0	0	20	000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	29.802.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	29.802.400,00
5	0	0	20	000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	14 Laporan	84.151.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		14 Laporan	84.151.400,00
5	0	0	20	000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Laporan	69.666.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	69.666.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20	000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	89.382.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	89.382.500,00
5	0	0	20	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Dokumen	41.790.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Dokumen	41.790.000,00
5	0	0	20	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Dokumen	43.279.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	43.279.000,00
5	0	0	20	001	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Dokumen	39.910.900,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	39.910.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	144 Orang	58.179.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		144 Orang	58.179.500,00
5	0	0	20	001	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	33 Lembaga	64.274.450,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		33 Lembaga	64.274.450,00
5	0	0	20		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah		100 %	557.239.185.862,55		-	100 % 100 %	557.239.185.862,55
5	0	0	20	000	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Laporan	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	50.000.000,00
5	0	0	20	000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Musi Banyuasin Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	1 Laporan	541.746.901.358,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA DESA		1 Laporan	541.746.901.358,00
5	0	0	20	000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Musi Banyuasin Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.442.284.504,55	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	15.442.284.504,55

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah		100%	220.420.650,00		-	100%	220.420.650,00
5	0	0	20	000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Dokumen	160.143.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	160.143.000,00
5	0	0	20	000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	144 Orang	60.277.650,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		144 Orang	60.277.650,00
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Data Aset Yang Akurat		100 %	1.080.733.500,00		-	100 %	1.080.733.500,00
5	0	0	20		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin		1 Laporan 100 %	1.080.733.500,00		-	1 Laporan 100 %	1.080.733.500,00
5	0	0	20	000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Dokumen	104.978.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	104.978.400,00
5	0	0	20	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan	1 Laporan	110.080.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	110.080.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jaya						
5	0	0	20	000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Laporan	71.126.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	71.126.000,00
5	0	0	20	000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Laporan	241.478.700,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	241.478.700,00
5	0	0	20	000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Laporan	57.287.400,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	57.287.400,00
5	0	0	20	000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Laporan	46.630.200,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Laporan	46.630.200,00
5	0	0	20	001	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	1 Dokumen	115.921.800,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1 Dokumen	115.921.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuuan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0	0	20	001	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Laporan	42.498.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	42.498.000,00
5	0	0	20	001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	2 Laporan	153.647.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2 Laporan	153.647.000,00
5	0	0	20	001	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Musi Banyuasin Sekayu Serasan Jaya	80 Orang	137.086.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		80 Orang	137.086.000,00
J U M L A H									583.297.367.608,24				583.297.367.608,24

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 serta Visi-Misi dan Program unggulan Kepala Daerah Terpilih serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan. Rencana kerja dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. untuk mendukung Prioritas Daerah Pemerintah Musi Banyuasin ***“Transformasi digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, inovatif dan melayani”*** dengan Sasaran ***“Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”*** tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Untuk Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merencanakan 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) kebijakan didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja

tujuan, 8 (delapan) Indikator sasaran kinerja dengan 3 (tiga) program, 14 (Empat belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub Kegiatan.

Dalam Pencapaian program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian dan kerjasama antar bidang di jajaran BPKAD sebagai unsur perencanaan sekaligus pelaksanaan dari Sub kegiatan, Kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan Tahun Anggaran Perubahan 2025.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ARIYANTO, S.E., M.Si
Pembina

NIP 19780427 200212 1 007